

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo)

Oleh :

**AMRIANTO A. LABDUL
E.11.16.083**

SKRIPSI

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

(Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo)

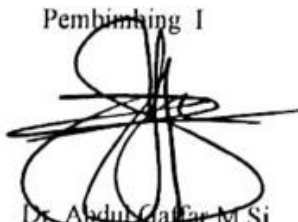
Oleh :

**AMRIANTO A. LABDUL
E.11.16.083**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 17 Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abdul Gaffar M. Si
NIP.1962123119871029

Pembimbing II



Rusdi Abdul Karim, SE., M. Ak
NIDN : 0902086402


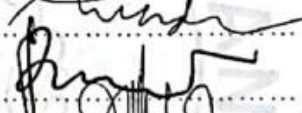



HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Pemberdayaan Anak Provinsi Gorontalo)

SKRIPSI

OLEH :

AMRIANTO A. LABDUL
E11.16.083

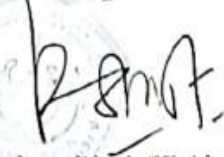
Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 April 2021

1. Dr. Abdul Gaffar, M.Si	:	
2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak	:	
3. Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM	:	
4. Melinda Ibrahim, SE., MSA	:	
5. Marina Paramitha S P, SE., M.Ak	:	

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo
S.Psi., SE., MM
NIDN : 0912057502

Ketua Program Studi Akuntansi


Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si
NIDN : 0914027902

PERNYATAAN

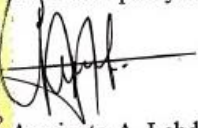
Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengandisebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 17 Maret 2021

Verifikasi membuat pernyataan





Amrianto A. Labdul
E.11.16.083

ABSTRACT

AMRIANTO A. LABDUL. E1116083. THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARD IMPLEMENTATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION AT SOCIAL, WOMEN EMPOWERMENT, AND CHILD PROTECTION AGENCY OF GORONTALO PROVINCE

This study is aimed at discovering the influence of governmental accounting standard implementation on the financial statement presentation at Social, Women Empowerment, and Child Protection Agency of Gorontalo Province. The method used in this study is a quantitative design. Samples taken from the population are 30 respondents. The primary data implements questionnaires for data collection. The data analysis employs Path Analysis supported by SPSS Version 21. The result of the study demonstrates that the implementation of governmental accounting standard (X) simultaneously influences the quality of financial statement presentation (Y) at Social, Women Empowerment, and Child Protection Agency of Gorontalo Province by 0,997 (99,7%). The unstudied external variable shares 0,03 (0,6%). The financial statement presentation (X1) by 0,367 (36,7%), budget realization report (X2) by 0,107 (10,7%), cash flow statement (X3) by 0,278 (27,8%), and notes of financial statement (X4) by 0,282 (28,2%), partially influence on the financial statement presentation (Y).

Keywords: governmental accounting standard, quality of financial statement presentation



ABSTRAK

AMRIANTO A. LABDUL. E1116083. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif. Sampel dari populasi yang ada berjumlah 30 orang responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur didukung dengan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) secara *simultan* berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebesar 0,997 (99,7%). Terdapat sebesar 0,03 (0,6%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti. Penyajian Laporan Keuangan (X1) sebesar 0,367 (36,7%), Laporan Realisasi Anggaran (X2) sebesar 0,107 (10,7%), Laporan Arus Kas (X3) sebesar 0,278 (27,8%) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) sebesar 0,282 (28,8%) berpengaruh secara *parsial* terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (Y).

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, kualitas penyajian laporan keuangan



MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaklah berharap”

(QS : Al-Insyarah)

“Pedang terbaik yang dimiliki ialah sebuah kesabaran tanpa batas”

(Amrianto A. Labdul)

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan Skripsi ku pada orang-orang tersayang:

Kedua Orang tuaku, Papa (Anis Labdul) dan Mama (Rosna Thaib) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih banyak buat kalian.

Adikku (Adelia Yulisa Dwiyaniti Labdul) yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku. Terima kasih atas semuanya.

Sahabat seperjuangan Akademik dan Organisasi Angkatan 16, Nuraminta Febriana Sari, Febrianty Ayu Lestari, Nurhindasah Aliwu, dan Olvianty G. Husain yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa kuliah, senang susah dirasakan Bersama-sama.

Organisasi Intra Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, terima kasih kepada Senior dan Junior yang selalu berbagi ilmu dan tawa selama saya berorganisasi. Thankyou

&

Ucapan terimakasih yang teramat dalam kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Ichsan Gorontalo dan terkhususnya kepada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi atas semua bimbingannya.

**TERIMA KASIH UNTUK
ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo), sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) baik secara simultan dan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi perbaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing I. Dr. Ariawan

S.Psi.,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Rahma Rizal,SE.,Akt.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak selaku pembimbing II serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya, yang memberikan semangat dan motivasi serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung saya. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi penelitian ini. Saran dan kritik, penulis harapkan dari komisi penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 17 Maret 2021

Amrianto A. Labdul
E11.16.083

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
 HIPOTESIS	9
22.1. Kajian Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	9
2.1.2 Implementasi PP No 71 Tahun 2010.....	10
2.1.3 Penerapan Akuntansi Basis Akrua.....	14
2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	17
2.1.5 Prinsip – Prinsip Akuntansi Pemerintah.....	21
2.1.6 Elemen Laporan Keuangan	22
2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	24
2.1.8 Pengaruh SAP thp Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.....	27
2.1.9 Penelitian Terdahulu	28

2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Hipotesis.....	31
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Objek Penelitian	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	32
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	33
3.2.3 Jenis Sumber data	35
3.2.4 Populasi dan Sampel	36
3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data	39
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian	39
3.2.7 Metode Analisis Data	43
3.2.8 Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	46
4.1.2 Visi dan Misi Lokasi Penelitian.....	47
4.1.3 Analisis Diskriptif.....	48
4.2 Diskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian.....	50
4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	66
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	70
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.3.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan secara <i>simultan</i>	75
4.3.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan secara <i>parsial</i>	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel X	34
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y	34
Tabel 3.3 Pilihan Jawaban Responden.....	35
Tabel 3.4 Jumlah Populasi	36
Tabel 3.5 Jumlah Sampel	37
Tabel 3.6 Indeks Korelasi	41
Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasar Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasar Usia	49
Tabel 4.3 Klasifikasi responden berdasar Pengalaman Kerja	49
Tabel 4.4 Skala Penelitian Jawaban Responden.....	50
Tabel 4.5 Nilai (Skor) Variabel X_1	51
Tabel 4.6 Nilai (Skor) Variabel X_2	53
Tabel 4.7 Nilai (Skor) Variabel X_3	54
Tabel 4.8 Nilai (Skor) Variabel X_4	57
Tabel 4.9 Nilai (Skor) Variabel Y	59
Tabel 4.10 Uji Validitas dan Reliabilitas sub variabel X_1	67
Tabel 4.11 Uji Validitas dan Reliabilitas sub variabel X_2	67
Tabel 4.12 Uji Validitas dan Reliabilitas sub variabel X_3	68
Tabel 4.13 Uji Validitas dan Reliabilitas sub variabel X_4	69
Tabel 4.14 Uji Validitas dan Reliabilitas variabel Y	70
Tabel 4.15 Hasil Estimasi Pengujian Hip. dan besarnya pengaruh $X \rightarrow Y$	71
Tabel 4.16 Dekomposisi Pengaruh Variabel X ke Variabel Y	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 3.1 Struktur Path Analysis	44
Gambar 4.1 Hasil Estimasi Struktur analisis jalur	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bagi pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban dan suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. (Adhi dan Suhardjo, 2013)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015). Karena laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan secara efektif.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain ; Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Demi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Warsito:2010). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan yang menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andalakan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Amanat undang-undang no 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Deddi dan Hartianti,

2006). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai PP No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari: 1). Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. 2). PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 3). PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 4). PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 5). PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 6). PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 7). PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7). PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 9). PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 10). PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 11). PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; 12). PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 13). PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa: a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), c). Neraca, d). Laporan Arus Kas, e). Laporan Operasional, f). Laporan Perubahan Ekuitas, g). Catatan atas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang menjadi rujukan pada penelitian ini antara lain; Nugraeni (2015) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empirik. Purwaniati (2008) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650.

Penelitian dilakukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik audit intern maupun audit ekstern. Salah satu instansi yang ada di lingkungan Provinsi Gorontalo yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Untuk pengelolaan keuangannya pemerintah provinsi Gorontalo sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala dinas sosial. Penerapan SAP Nomor 71 ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Gorontalo sehingganya tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan, untuk itu makalah laporan keuangan wajib disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan merumuskan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *simultan* terhadap

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

2. Seberapa besar pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
3. Seberapa besar pengaruh Laporan Realisasi Anggaran (X2) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
4. Seberapa besar pengaruh Laporan Arus Kas (X3) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
5. Seberapa besar pengaruh Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *simultan* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Laporan Realisasi Anggaran (X2) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Laporan Arus Kas (X3) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Catatan Atas Laporan (X4) secara *parsial* terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mempelajari tentang teori serta praktik tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat bagi praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat digunakan dan diterapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

3. Manfaat Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah dikuatkan dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah suatu standar pedoman prinsip-prinsip yang di gunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya standar akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus di susun berdasarkan standar ini. laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu tidak memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. informasi ini sangat berguna untuk pihak intern dan ekstern.

Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah pemerintah itu sendiri yang di gunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini kreditur, investor, bank pemerintah dari daerah lain, atau pihak lain dari negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

Dalam satu penjelasan di undang-undang pembendaharaan negara disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah (PP No 24 Tahun 2005) dan disusun oleh suatu komite standar akuntansi pemerintahan, yang independen yang terdiri dari para profesional, yang bekerja berdasarkan suatu due proses. Usulan standar yang disusun oleh komite juga telah mendapat pertimbangan dari badan pemeriksaan keuangan sebagai dasar untuk penyempurnaan.

Laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. hal tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 30 dan pasal 31 undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menetapkan bahwa audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah.

2.1.2 Implementasi PP No 71 Tahun 2010

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Transparansi yang merupakan salah satu tujuan MDGs diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atau Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis kas ke basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan. (Mardiasmo, 2009:20)

Ada dua jenis basis yang umum digunakan untuk mengakui suatu transaksi, yaitu Basis Akrual (*Accrual Basis*), dan Basis Kas (*Cash Basis*). Di beberapa literatur Akuntansi Sektor Publik, ada yang menyebutkan basis Akrual Modifikasian dan Kas Modifikasian. Namun demikian, pemahaman dasar kedua basis yang modifikasian tersebut tetap pada Basis Akrual dan Basis Kas, bedanya ada pada modifikasi penyesuaian di akhir periode.

Perbedaan mendasar keduanya adalah; apabila basis akrual akan mengakui transaksi pada saat terjadinya sebagai contoh Pemda A membeli sebidang tanah senilai Rp 100 juta pada tanggal 15 Desember 2010, dan pembayaran atas pembelian tersebut dilakukan pada 13 Januari 2011. Dengan menggunakan *basis akrual*, Pemda A mengakui bahwa transaksi pembelian tersebut terjadi pada 15 Desember 2010, sehingga pencatatan pun dilakukan pada 15 Desember 2010. Akibatnya, jika Pemda A di akhir tahun 2010 (31 Desember 2010) menyusun neraca basis akrual, di bagian Aktiva (Harta) bertambahlah akun aset tetap senilai Rp 100 juta, dan di bagian Utang (Kewajiban) bertambah pula akun Utang atas Aset tersebut senilai Rp 100 juta. Untuk transaksi yang sama, jika Pemda A menerapkan Basis Kas, maka transaksi diakui ketika kas dibayarkan (atau diterima, jika pada kasus penerimaan kas). Akibatnya, di neraca per 31 Desember 2010 tidak ada perubahan apa pun. Transaksi baru diakui pada 13 Januari 2011.

Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. Dengan laporan keuangan berbasis akrual pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha. Dalam masa transisi sampai dengan 2015, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, Sonny Loho, kendala implementasi standar akuntansi pemerintah antara lain adalah SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, ketersediaan sarana/prasarana, ketersediaan anggaran, kapasitas manajemen, kemauan politik. Sementara itu strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan peraturan tersebut adalah komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyediaan SDM yang kompeten, peranan APIP sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, pengelolaan BMN/BMD, mengintensifkan *rewards and punishments*, diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit. (Mahmudi, 2007:11)

2.1.3 Penerapan Akuntansi Basis Akrua

Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP. Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan antara lain: 1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 - *cash towards accrual*) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2. SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang tersebut (*misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun buku*).

Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1) menyusun PSAP berbasis akrual seluruhnya dari awal; dan (2) menyesuaikan PSAP berbasis kas menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang berlaku, administrasi pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia. Atas dua strategi tersebut, KSAP sepakat menggunakan strategi yang ke-2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, Governmental Accounting Standards Board (GASB), dan Government Finance Statistics (GFS), sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum;
- b. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi;
- c. Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah karena sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, dan 08 dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual;
- d. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan

dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP AkruaI terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Secara ringkas perbedaan komponen laporan keuangan basis akrual dengan basis kas menuju akrual disajikan pada Lampiran II.

Struktur SAP berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (Mardiasmo, 2009:35)

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidak pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.1.5 Prinsip – Prinsip Akuntansi Pemerintah

Prinsip akuntansi pemerintah diuraikan sebanyak 12 prinsip dalam kodifikasi Standar Akuntansi Pemerintahan di Amerika Serikat, yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintah. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. prinsip akuntansi dan pelaporan
2. Prinsip sitem akuntansi dana
3. Prinsip macam-macam dana
4. Prinsip jumlah dana
5. Prinsip akuntansi aset tetap dan utang jangka panjang
6. Prinsip penilaian aset tetap
7. Prinsip penyusutan aset tetap
8. Prinsip ases himpunan dalam akuntansi pemerintah

9. Prinsip Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran
10. Prinsip klasifikasi perkiraan transfer, pendapatan, dan belanja
11. Prinsip istilah dan klasifikasi umum
12. Prinsip pertanggung jawaban interim dan tahunan

2.1.6 Elemen Laporan Keuangan

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Empat elemen utama dalam laporan realisasi anggaran terdiri atas, yakni :

1. Pendapatan

Standar akuntansi pemerintah (SAP) mendefinisikan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/propinsi yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan daerah pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan propinsi maupun penerimaan pembiayaan.

UU No Tahun 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sesuai permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan permendagri No. 59 tahun 2007 pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Belanja menurut kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung
- b. Kelompok belanja tidak langsung sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, Termasuk dana perimbangan dan bagi hasil, transfer terdiri dari :dana bagi hasil, dana bagi hasil sumberdaya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, data otonomi khusus dan dana penyesuaian. (dikutip dari skripsi Fani saleh, 2015: 23).

4. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.. (dikutip dari skripsi Fani saleh, 2015: 24).

2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010):

1. relevan
2. andal
3. dapat dibandingkan
4. dapat dipahami

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan

adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
3. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periodesebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi

yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.8 Pengaruh SAP terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005:134) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Kusumah (2012); Nugraheni dan Subaweh (2008). Hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP

terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

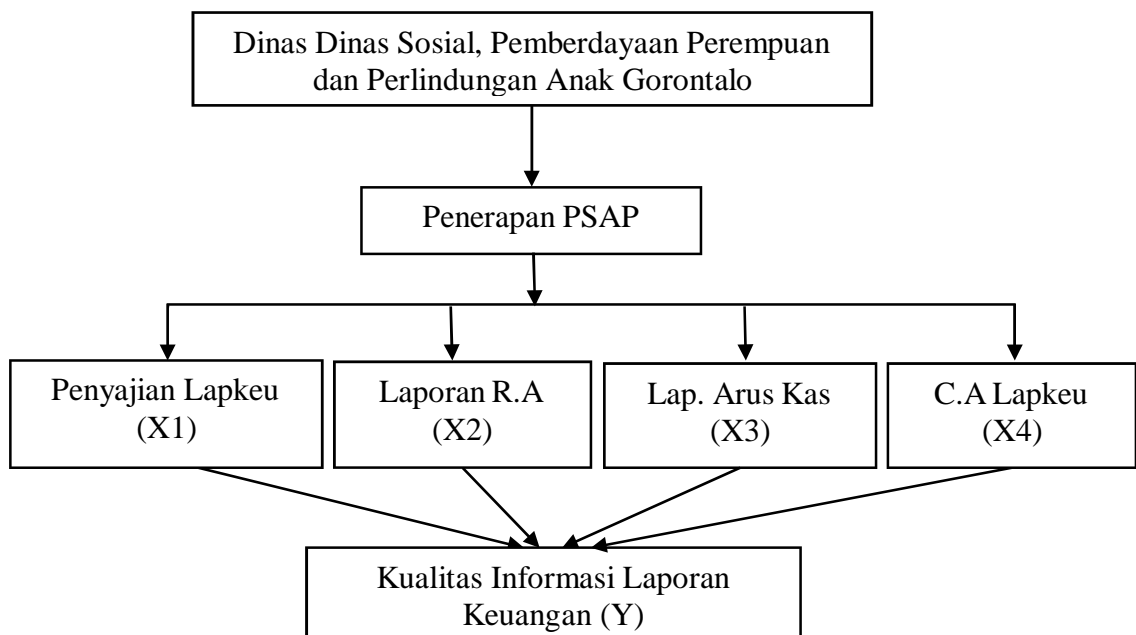
Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Umar, 2018	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas penyajian laporan keuangan	Regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo
<i>Purwaniati</i> , 2008	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana	Regresi berganda	Hasil menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka Konstanta peningkatan kaulitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

Yusup, 2014	Penerapan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung)	Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Regresi berganda	Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan Keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.
Fikri, 2016	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi	SAP, Kompetensi dan Peran Audit	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa pemerintahan penewrapan standar Akuntansi pemerintah, Kompetensi aparatur, peran internal audit Memiliki

	Laporan Keuangan			berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.
--	------------------	--	--	--

2.2. Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan satu pemikiran tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dari teori tersebut dapat digambarkan kedalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
2. Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
3. Laporan Realisasi Anggaran (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
4. Laporan Arus Kas (X3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
5. Catatan Atas Laporan (X4) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), lokasi penelitian Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Nasution (2001:23) Menyatakan bahwa Desain Penelitian merupakan rencana mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan batasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial

yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2012:15)

3.2.2 Operasionalisasi Variabel.

Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari 13 Standar, namun penulis hanya mengambil 4 standar sesuai dengan pelaksanaan di lokasi penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasionalisasi variabel bebas (X1) dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sub variabel sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas penyajian laporan keuangan (Y) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Relevan, Laporan keuangan Pemerintah termuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna.
- b. Andal, Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur.

- c. Dapat Dibandingkan, laporan keuangan Pemerintah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
- d. Dapat Dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan

Tabel 3.1 Operasional Variabel (X)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	PSAP 01 (X ₁)	1. Beban (Biaya) 2. Laporan LRA	Ordinal
	PSAP 02 (X ₂)	1. Penyajian Ikhtisar Sumber 2. Penyajian Pendapatan	Ordinal
	PSAP 03 (X ₃)	1. Laporan Arus keluar/Masuk 2. Laporan Aktivitas operasi	Ordinal
	PSAP 04 (X ₄)	1. CALK sisgematis penyusunan 2. CALK pos-pos Lap.keuangan	Ordinal

Sumber : Mardiasmo, 2009:35

Tabel 3.2 Operasional Variabel (Y)

Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Penyajian laporan Keuangan(Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat difahami	Ordinal

Sumber : PP no. 71 tahun 2010

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel yang ada baik variabel independen (X) maupun variabel dependen (Y), akan diukur dengan menggunakan instrument kuesioner, dengan menggunakan Skala Likert (*Likert's Type Item*).

Jawaban

setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai grade dari sangat positif sampai sangat negatif, Kuesioner disusun dengan menyiapkan 5 pilihan (*option*), setiap pilihan akan diberikan bobot yang berbeda yakni seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pilihan Jawaban Kuesioner

Pilihan	Bobot
Sangat Setuju/Selalu (sangat tinggi)	5
Setuju/Sering (Tinggi)	4
Ragu – ragu/Kadang- kadang (cukup tinggi)	3
Tidak Setuju/Jarang (rendah)	2
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah (sangat rendah)	1

Sumber : Riduwan (2007: 86)

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data diperlukan dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu :

1. **Jenis Data**, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Data Kuantitatif, adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada responden.
 - b. Data Kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah seluk-beluk perusahaan termasuk visi dan misi.

2. **Sumber Data**, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penyebaran kuesioner kepada responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

3.2.4 Populasi dan Sampel

3.2.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:57) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek/subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Riduwan (2007:3) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.

Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang berjumlah 89 orang yang terdiri dari :

Tabel 3.4
Daftar Jumlah Populasi

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Subag. Perencanaan	4 Orang
4	Subag. Umum dan kepegawaian	8 Orang
5	Subag. Keuangan	6 Orang
6	Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Sosial	1 Orang
7	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Orang
8	Bidang rehabilitasi Sosial	1 Orang

9	Bidang Kelembagaan dan kemitraan	1 Orang
10	Bidang Pemberdayaan perempuan	1 Orang
11	Seksi K3RS dan PPSDBS	5 Orang
12	Seksi Pemberdayaan KAT	6 Orang
13	Seksi Penangan Fakir Miskin	6 Orang
14	Seksi Perlinsos Korban Bencana Sosial	3 Orang
15	Seksi Perlinsos Korban Bencana Alam	6 Orang
16	Seksi Jamsos Keluarga dan Pendataan PMKS	5 Orang
17	Seksi Anak	5 Orang
18	Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	6 Orang
19	Seksi Rehabilitasi Sosial Tusos	3 Orang
20	Seksi Peksos dan Pengemb. SDM Kesos	3 Orang
21	Seksi Kelembagaan Sosial	3 Orang
22	Seksi Kemitraan Sosial	3 Orang
23	Seksi Pemenuhan hak perempuan	4 Orang
24	Seksi peningkatan kualitas hidup perempuan	3 Orang
25	Seksi Gender dan Data Informasi	3 Orang
Jumlah Karyawan		89 Orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

3.2.4.2. Sampel

Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan ukuran sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2012:76) bahwa *Purposive Sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dilaksanakan agar penelitian ini lebih efisien, dan dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa mewakili seluruh populasi, yaitu kuesioner hanya diberikan kepada responden mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sekaligus dijadikan sample penelitian. Maka sampel yang dipilih dalam penelitian adalah sebanyak 30

orang dengan pertimbangan bahwa 30 orang tersebut bila diberikan koesioner akan dapat menjawab dengan tepat karena mereka mengetahui dan faham tentang sistem pengendalian intern yang terdiri dari:

Tabel 3.5
Daftar Jumlah
Sampel

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Subag. Perencanaan	1 Orang
4	Subag. Umum dan kepegawaian	1 Orang
5	Subag. Keuangan	6 Orang
6	Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Sosial	1 Orang
7	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Orang
8	Bidang rehabilitasi Sosial	1 Orang
9	Bidang Kelembagaan dan kemitraan	1 Orang
10	Bidang Pemberdayaan perempuan	1 Orang
11	Seksi K3RS dan PPSDBS	1 Orang
12	Seksi Pemberdayaan KAT	1 Orang
13	Seksi Penangan Fakir Miskin	1 Orang
14	Seksi Perlinsos Korban Bencana Sosial	1 Orang
15	Seksi Perlinsos Korban Bencana Alam	1 Orang
16	Seksi Jamsos Keluarga dan Pendataan PMKS	1 Orang
17	Seksi Anak	1 Orang
18	Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	1 Orang
19	Seksi Rehabilitasi Sosial Tusos	1 Orang
20	Seksi Peksos dan Pengemb. SDM Kesos	1 Orang
21	Seksi Kelembagaan Sosial	1 Orang
22	Seksi Kemitraan Sosial	1 Orang
23	Seksi Pemenuhan hak perempuan	1 Orang
24	Seksi peningkatan kualitas hidup perempuan	1 Orang
25	Seksi Gender dan Data Informasi	1 Orang
Jumlah Karyawan		30 Orang

Sumber : Diolah kembali

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi – informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku dan sumber informasi lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau pada objek yang diteliti, dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

2. Wawancara

Adalah teknik yang digunakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus dan karyawan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.

3. Kuesioner

Adalah daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang menjadi sampel penelitian.

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat ukur yang valid dan andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan objektif.

1 Uji Validitas

Menurut Sugiono (2012:109) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian validitas, peneliti menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana:

r = Angka Korelasi

X = Skor Pertanyaan (ke N)

variabel XY = Skor Pertanyaan (ke N) variabel Y

XY = Skor Pertanyaan dikali skor total

pertanyaann = jumlah responden

Selanjutnya **dihitung** dengan uji-t dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana:

t = Nilai t-hitung

r = Koefisien Korelasi hasil r

hitungn = Jumlah Responden

Distribusi (table t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$) kaidah keputusan, jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid. Jika instrumen itu valid, maka dapat dilihat tingkat korelasi berdasarkan indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indeks
Korelasi

r	Keterangan
0,800 – 1,000	Sangat tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Cukup tinggi
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Riduwan (2004:110)

2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat di percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumentersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat di percaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di percaya juga. Apabila

datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun di ambil, tetap akan sama. Untuk menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus *alpha cronbach* menurut Ghozali (2005:45) dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum si^2}{st} \right)$$

Keterangan :

K = Jumlah instrument pertanyaan
 $\sum Si^2$ = Jumlah varians dalam setiap instrumen
 S = Varians keseluruhan instrument

Suatu variabel di katakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2005:46). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

3. Konversi Data Ordinal ke Interval

Untuk mengukur Interval-interval tersebut akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah data dengan skala ordinal, sedangkan untuk menganalisis dalam penelitian ini diperlukan data dengan ukuran skala interval.

Kemudian Harun Al-Rasyid dalam Ridwan dan Engkos Kuncoro (2006:30) mengemukakan bahwa tehnik yang dalam transformasi *scale value* Dataordinal kedatainterval adalah *Method Of Succesive Interval* (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Hitung Frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah frekwensi (f) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*)
6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV (Scale) = \frac{(\text{Density at lower limit})(\text{density at upper limit})}{(\text{area under upper limit})(\text{density under lower limit})}$$

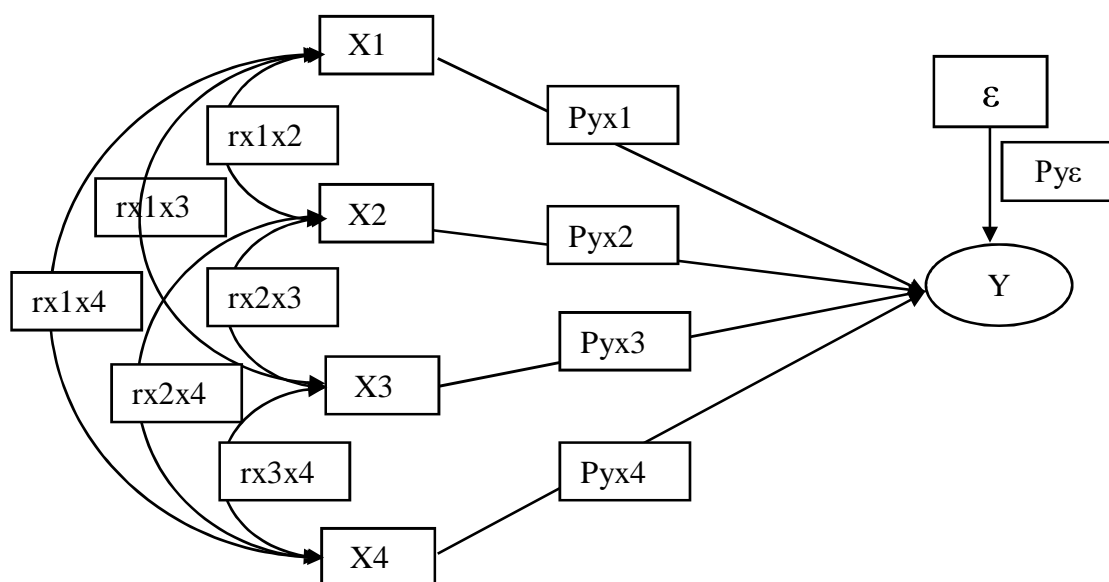
Keterangan :

(Density at lower limit	=	Kepadatan Batas bawah
(Density at upper limit	=	Kepadatan Batas atas
(Area under upper limit	=	Daerah dibawah batas atas
(density under lower limit	=	Daerah dibawah batas bawah

3.2.7 Metode Analisis Data

Untuk memastikan sub-sub variabel apakah ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan

Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan(X4) serta variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Rancangan uji hipotesis dilakukan untuk memastikan variabel X yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel X), berpengaruh kepada Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (variabel Y). maka pengujian dilakukan dengan uji analisis jalur, dengan terlebih dahulu mengkonversi data skala ordinal ke skala interval, analisis jalur sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur Path Analisis

Dimana :

- X_1 : Penyajian Laporan Keuangan
- X_2 : Laporan Realisasi Anggaran
- X_3 : Laporan Arus Kas
- X_4 : Catatan Atas Laporan Keuangan

- Y : Kualitas Informasi laporan Keuangan
 ε : Variabel lain yang mempengaruhi Y
r : Korelasi antar variabel X
PY : Koefisien jalur untuk mendapatkan pengaruh langsung

Data yang terkumpul dianalisis hubungan kausalnya antara variabel-variabel atau dimensi-dimensi yang dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) yang memperlihatkan pengaruh. Gambar di atas juga memperlihatkan bahwa sub-sub variabel tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 tetapi ada variabel epsilon (ε) yaitu variabel yang tidak diukur dan diteliti.

3.2.8 Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam pengujian hipotesis menggunakan *Path Analysis* (Nirwana dalam Ucon Arif, (2006:26) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat persamaan struktural, yaitu :

$$Y = PYX_1 + PYX_2 + PYX_3 + PYX_4 + PY\varepsilon$$

2. Menghitung matriks korelasi antar X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y.
3. Menghitung koefisien jalur P_{yx_i} ($i = 1, 2, 3$ dan 4)
4. Menghitung matrix korelasi antar variabel *eksogenous*
5. Menghitung matriks invers R_1^{-1} ,
6. Menghitung R^2 yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 terhadap Y

7. Menghitung pengaruh variabel lain ($P_{y\varepsilon}$) dengan menggunakan rumus:

$$\sqrt{P_{y\varepsilon} = 1 - R^2_{y(X_1, X_2, X_3, X_4)}}$$

8. Menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Tugas utama suatu dinas adalah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Dengan adanya UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka pada tahun 2001 terbentuklah Provinsi Gorontalo.

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo sebagai salah satu perangkat daerah yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan unit pelaksana teknis dinas, pada saat itu masih bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2002 atas persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo berpisah dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2002 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial.

Usaha dari Dinas Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial.

Dengan adanya perubahan Nomenklatur baru maka pada tanggal 1 Agustus 2007 berubahlah namanya menjadi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial

- a. Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif
- b. Misi Dinas Sosial.
 - 1. Mendorong Dan Mendukung Perluasan Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Dan Masyarakat.
 - 2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan masyarakat.
 - 3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegiatan Royongan Dan Tanggung Jawab/ Kepedulian Sosial.
 - 4. Mengembangkan Potensi Dan Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial Serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif. Pembahasan masing-masing deskriptif sebagai berikut :

4.1.3.1 Karakteristik responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin dan Usia. Deskripsi karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Responden menurut jenis kelamin.

Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasar jenis kelamin

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	19 orang	63 %
2	Perempuan	11 orang	37 %
Total		30 orang	100 %

Sumber : Data diolah, 2021

Jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berjumlah 30 orang, yang terdiri 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan.

2. Responden menurut jenis Usia.

Sasaran responden pada penelitian ini pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, usia responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasarkan Usia.

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	Diatas 45 Tahun	6 orang	20 %
2	Diantara 26-44 Tahun	15 orang	50 %
3	Dibawah 25 Tahun	9 orang	30 %
Total		30 orang	100 %

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 30 responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 6 orang responden yang berusia diatas 45 tahun atau sebesar 20%, sebanyak 15 orang responden yang berusia diantara 26-44 tahun atau sebesar 50% dan responden yang berusia dibawah 25 sebanyak 9 orang responden tahun atau sebesar 30%.

4.3 Klasifikasi responden berdasarkan pengalaman kerja

No.	Pengalaman	Jumlah	Persentase
1	Diatas 15 Tahun	4 orang	13 %
2	Diantara 10-15 Tahun	11 orang	37 %
3	Diantara 5-10 Tahun	9 orang	30 %
3	Dibawah 5 Tahun	6 orang	20 %
Total		30 orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 30 responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 5 orang responden yang berpengalaman kerja dibawah 5 tahun atau sebesar 20%, sebanyak 9 orang responden yang berpengalaman kerja diantara 5-10 tahun atau sebesar 30%, sebanyak 11 orang responden yang berpengalaman kerja diantara 10-15 tahun atau sebesar 37% dan responden yang berpengalaman kerja diatas 15 sebanyak 4 orang responden tahun atau sebesar 13%.

4.2 Diskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Bobot-Bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot *option* (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot *option* dengan frekuensi. Berikut perhitunganya :

Bobot terendah x Item x Jumlah responden : $1 \times 1 \times 30 =$

30Bobot tertinggi x Item x Jumlah responden :

$5 \times 1 \times 30 = 150$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagai berikut :

$$\text{Rentang skalanya yaitu } \frac{150 - 30}{5} = 24$$

Tabel- 4.4
Skala penelitian jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	30 - 54	Sangat rendah
2	55 - 79	Rendah
3	80 - 104	Cukup tinggi
4	104 - 129	Tinggi
5	130 - 150	Sangat tinggi

Sumber : hasil olahan data 2021

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing item pernyataan dapat dijabarkan pada table berikut :

1). Gambaran Umum Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari 3 item pernyataan, Berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Penyajian Laporan Keuangan (X1). Menurut tanggapan responden dapat dilihat dihalaman berikut :

Tabel 4.5
Nilai (Skor) Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X1.1			Item Pernyataan X1.2			Item Pernyataan X1.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35,0	23,3	5	25	16,7	5	25,0	16,7
4	20	80,0	66,7	14	56	46,7	15	60,0	50,0
3	3	9,0	10,0	10	30	33,3	9	27,0	30,0
2	-	-	-	1	2	3,3	1	2,0	3,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	124	100,0	30	113	100,0	30	114,0	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X1) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Beban (Biaya) dicatat pada saat terjadinya transaksi menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu dicatat pada saat terjadinya transaksi, 20 orang (66,7%) menjawab sering dicatat pada saat terjadinya transaksi, 3 orang (10,0%) dan menjawab kadang-kadang dicatat pada saat terjadinya transaksi dengan standar kategori tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas, 14 orang (46,7%) menjawab sering penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Pendapatan dicatat pada saat terjadinya transaksi menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu Pendapatan dicatat pada saat terjadinya transaksi, 15 orang (50,0%) menjawab sering Pendapatan dicatat pada saat terjadinya transaksi, 9 orang (30,0%) menjawab kadang-kadang Pendapatan dicatat pada saat terjadinya transaksi dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang Pendapatan dicatat pada saat terjadinya transaksi dengan standar kategori sangat tinggi.

2). Gambaran Umum Laporan Realisasi Anggaran (X2)

Laporan Realisasi Anggaran (X2) terdiri dari 3 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Laporan Realisasi Anggaran (X2). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.6
 Nilai (Skor) Laporan Realisasi Anggaran (X2)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X2.1			Item Pernyataan X2.2			Item Pernyataan X2.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25,0	16,7	5	25	16,7	4	20	13,3
4	14	56,0	46,7	14	56	46,7	22	88	73,3
3	9	27,0	30,0	10	30	33,3	4	12	13,3
2	2	4,0	6,7	1	2	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	112	100,0	30	113	100,0	30	120	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X2) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator penyajian ikhtisar LRA dalam satu periode pelaporan menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu penyajian ikhtisar LRA dalam satu periode pelaporan, 14 orang (46,7%) menjawab sering penyajian ikhtisar LRA dalam satu periode pelaporan, 9 orang (30,0%) menjawab kadang-kadang penyajian ikhtisar LRA dalam satu periode pelaporan dan 2 orang (6,7%) menjawab jarang penyajian ikhtisar LRA dalam satu periode pelaporan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator realisasi pendapatan yang diakui pada saat kas masuk menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu realisasi pendapatan yang diakui pada saat kas masuk, 14 orang (46,7%) menjawab sering realisasi pendapatan yang diakui pada saat kas masuk, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang realisasi pendapatan yang diakui pada saat

kas masuk dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang realisasi pendapatan yang diakui pada saat kas masuk dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator penyajian realisasi belanja yang diakui pada saat kas keluar menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu penyjian realisasi belanja yang diakui pada saat kas keluar, 22 orang (73,3%) menjawab sering penyjian realisasi belanja yang diakui pada saat kas keluar, dan 4 orang (13,3%) menjawab kadang-kadang penyjian realisasi belanja yang diakui pada saat kas keluar dengan standar kategori sangat tinggi.

3). Gambaran Umum Laporan Arus Kas (X3)

Laporan Arus Kas (X3) terdiri dari 5 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Laporan Arus Kas (X3). Menurut tanggapan respondendapat dilihat berikut :

Tabel 4.7
Nilai (Skor) Laporan Arus Kas (X3)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X3.1			Item Pernyataan X3.2			Item Pernyataan X3.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40,0	26,7	4	20	13,3	7	35	23,3
4	15	60,0	50,0	22	88	73,3	20	80	66,7
3	6	18,0	20,0	4	12	13,3	3	9	10,0
2	1	2,0	3,3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	120	100,0	30	120	100,0	30	124	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X3.4			Item Pernyataan X3.5		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25,0	16,7	7	35	23,3
4	14	56,0	46,7	15	60	50,0
3	10	30,0	33,3	7	21	23,3
2	1	2,0	3,3	1	2	3,3
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	113	100,0	30	118	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X3) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator penyajian ikhtisar Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi menunjukkan sebanyak 8 orang (26,7%) memberikan jawaban selalu menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi., 15 orang (50,0%) menjawab sering menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi., 6 orang (20,0%) menjawab kadang-kadang menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi. dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang penyajian menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi. dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Pencatatan laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 22 orang (73,3%) menjawab sering diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi dan

4 orang (3,3%) menjawab kadang-kadang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Pencatatan laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasi menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasi, 20 orang (66,7%) menjawab sering diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasi, dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang- diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasi dengan standar kategori sangat tinggi

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Pencatatan laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan, 14 orang (46,7%) menjawab sering diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Pencatatan laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas transitoris menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas transitoris, 15 orang (50,0%) menjawab sering diklasifikasikan berdasarkan aktivitas transitoris,

7 orang (23,3%) menjawab kadang-kadang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas transitoris dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas transitoris dengan standar kategori sangat tinggi.

4). Gambaran Umum Catatan Atas Laporan Keuangan (X4)

Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) terdiri dari 4 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Catatan Atas Laporan Keuangan (X4). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.8
Nilai (Skor) Catatan Atas Laporan Keuangan (X4)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X4.1			Item Pernyataan X4.2			Item Pernyataan X4.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35,0	23,3	5	25	16,7	4	20	13,3
4	20	80,0	66,7	14	56	46,7	23	92	76,7
3	3	9,0	10,0	10	30	33,3	3	9	10,0
2	-	-	-	1	2	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	124	100,0	30	113	100,0	30	121	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X4) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu disusun secara sistematis., 20 orang (66,7%) menjawab sering disusun secara sistematis dan 6 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang disusun secara sistematis dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu mengungkapkan penjelasan pos-pos

laporan neraca, 14 orang (46,7%) menjawab sering mengungkapkan penjelasan pos- pos laporan neraca, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi, 23 orang (76,7%) menjawab sering mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi, dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi dengan standar kategori sangat tinggi

5). Gambaran Umum Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) terdiri dari 16 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.9
 Nilai (Skor) Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan Y.1			Item Pernyataan Y.2			Item Pernyataan Y.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25,0	16,7	6	30	20,0	4	20	13,3
4	14	56,0	46,7	14	56	46,7	22	88	73,3
3	10	30,0	33,3	9	27	30,0	4	12	13,3
2	1	2,0	3,3	1	2	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	113	100,0	30	115	100,0	30	120	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan Y.4			Item Pernyataan Y.5			Item Pernyataan Y.6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35,0	23,3	7	35	23,3	5	25	16,7
4	20	80,0	66,7	20	80	66,7	14	56	46,7
3	3	9,0	10,0	3	9	10,0	10	30	33,3
2	-	-	-	-	-	-	1	-	3,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	124	100,0	30	124	100,0	30	111	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan Y.7			Item Pernyataan Y.8			Item Pernyataan Y.9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40,0	26,7	7	35	23,3	5	25	16,7
4	15	60,0	50,0	21	84	70,0	14	56	46,7
3	6	18,0	20,0	2	6	6,7	9	27	30,0
2	1	2,0	3,3	-	-	-	2	7	6,7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	120	100,0	30	125	100,0	30	115	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg.	Item Pernyataan Y.10			Item Pernyataan Y.11			Item Pernyataan Y.12		
Resp.	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25,0	16,7	6	30	20,0	4	20	13,3
4	13	52,0	43,3	13	52	43,3	22	88	73,3
3	11	33,0	36,7	10	30	33,3	4	12	13,3
2	1	2,0	3,3	1	2	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	112	100,0	30	114	100,0	30	120	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg.	Item Pernyataan Y.13			Item Pernyataan Y.14		
Resp.	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40,0	26,7	7	35	23,3
4	15	60,0	50,0	20	80	66,7
3	6	18,0	20,0	3	9	10,0
2	1	2,0	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	120	100,0	30	124	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Tangg.	Item Pernyataan Y.15			Item Pernyataan Y.16		
Resp.	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25,0	16,7	4	20	13,3
4	14	56,0	46,7	23	92	76,7
3	10	30,0	33,3	3	9	10,0
2	1	2,0	3,3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	30	113	100,0	30	121	100,0
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (y) sebagai berikut:

Item 1 tanggapan responden mengenai Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 14 orang (46,7%) menjawab sering yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 1 orang (3,3%) menjawab jarang yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan standar kategori Tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Informasi dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna masa lalu (*feedback value*) menunjukkan sebanyak 6 orang (20,0%) memberikan jawaban selalu mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu, 14 orang (46,7%) menjawab sering mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu, 9 orang (30,0%) menjawab kadang-kadang mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu, dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu dengan standar kategori Tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Informasi dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa datang (*predictive value*) menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu memprediksi kejadian masa datang (*predictive value*), 22 orang (73,3%) menjawab sering memprediksi kejadian masa datang (*predictive value*), dan 4 orang (13,3%) menjawab kadang-kadang memprediksi kejadian masa datang (*predictive value*) dengan standar kategori Tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini., 20 orang (66,7%) menjawab sering sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini dengan standar kategori Tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Informasi dalam Laporan Keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu dapat digunakan dalam mengambil keputusan., 20 orang (66,7%) menjawab sering dapat digunakan dalam mengambil keputusan dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dengan standar kategori Tinggi.

Item 6 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, 14 orang (46,7%) menjawab sering menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang

menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya dengan standar kategori Tinggi.

Item 7 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material menunjukkan sebanyak 8 orang (26,7%) memberikan jawaban selalu bebas dari pengertian yang menyesatkan, 15 orang (50,0%) menjawab sering bebas dari pengertian yang menyesatkan, 6 orang (20,0%) menjawab kadang-kadang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang bebas dari pengertian yang menyesatkan dengan standar kategori Tinggi.

Item 8 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang disajikan teruji kebenarannya menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu dapat teruji kebenarannya, 21 orang (70,0%) menjawab sering dapat teruji kebenarannya dan 2 orang (2,6%) menjawab kadang-kadang dapat teruji kebenarannya dengan standar kategori Tinggi.

Item 9 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu memenuhi kebutuhan para pengguna, 14 orang (46,7%) menjawab sering memenuhi kebutuhan para pengguna, 9 orang (30,0%) menjawab kadang-kadang memenuhi kebutuhan para pengguna dan 2 orang (6,7%) menjawab jarang memenuhi kebutuhan para pengguna dengan standar kategori Tinggi.

Item 10 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu, 13 orang (43,3%) menjawab sering tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu, 11 orang (36,7%) menjawab kadang-kadang tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu dengan standar kategori Tinggi.

Item 11 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya menunjukkan sebanyak 6 orang (20,0%) memberikan jawaban selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, 13 orang (43,3%) menjawab sering dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya,

10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan standar kategori Tinggi.

Item 12 tanggapan responden mengenai indikator Dinas Sosial menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, 22 orang (73,3%) menjawab sering berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan 4 orang (13,3%) menjawab

kadang-kadang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan standar kategori Tinggi.

Item 13 tanggapan responden mengenai indikator Dinas Sosial menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun menunjukkan sebanyak 8 orang (26,7%) memberikan jawaban selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, 15 orang (50,0%) menjawab sering menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, 6 orang (20,0%) menjawab kadang-kadang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan standar kategori Tinggi.

Item 14 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna menunjukkan sebanyak 7 orang (23,3%) memberikan jawaban selalu dapat dipahami oleh pengguna, 20 orang (66,7%) menjawab sering dapat dipahami oleh pengguna dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang dapat dipahami oleh pengguna dengan standar kategori Tinggi.

Item 15 tanggapan responden mengenai indikator Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna menunjukkan sebanyak 5 orang (16,7%) memberikan jawaban selalu disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, 14 orang (46,7%) menjawab sering disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, 10 orang (33,3%) menjawab kadang-kadang disesuaikan dengan batas

pemahaman para pengguna dan 1 orang (3,3%) menjawab jarang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dengan standar kategori Tinggi.

Item 16 tanggapan responden mengenai indikator Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti menunjukkan sebanyak 4 orang (13,3%) memberikan jawaban selalu disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti, 23 orang (76,6%) menjawab sering disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan 3 orang (10,0%) menjawab kadang-kadang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dengan standar kategori Tinggi.

4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam analisis ini untuk mengetahui tingkat validitas dapat dilihat padahasil olahan data. Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 30 responden. Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan *valid* (Sugiyono 2012) dan untuk uji reliabilitas adalah *reliabel* jika nilai *Alpha Crombach* > 0.60 (Ghozali, 2005:46).

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Penyajian laporan keuangan (PSAP 01)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas sub variabel Penyajian laporan keuangan (PSAP 01) pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
PSAP 01	X1.1	0,763	6,246	1,701	Valid	0,884	> 0,60 : Reliabel
	X1.2	0,975	23,218	1,701	Valid		
	X1.3	0,951	16,275	1,701	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Penyajian laporan keuangan (PSAP 01) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,884 dengandemikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Penyajian laporan keuangan (PSAP 01) adalah reliabel karena alpha cronbach > 0,60.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas sub variabel Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) padatable berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
(PSAP 02)	X2.1	0,974	22,750	1,701	Valid	0,869	> 0,60 : Reliabel
	X2.2	0,960	18,142	1,701	Valid		
	X2.3	0,716	5,427	1,701	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Kualitas *Website* menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,869 dengan demikian berarti

semua item pernyataan untuk variabel Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Laporan Arus Kas (PSAP 03)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas sub variabel Laporan Arus Kas (PSAP 03) pada tabel

berikut ini : Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
PSAP 03	X3.1	0,924	12,786	1,701	12,786	0,873	$> 0,60$: Reliabel
	X3.2	0,693	5,086	1,701	5,086		
	X3.3	0,885	10,058	1,701	10,058		
	X3.4	0,766	6,305	1,701	6,305		
	X3.5	0,830	7,874	1,701	7,874		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Laporan Arus Kas (PSAP 03) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,873 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Laporan Arus Kas (PSAP03) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAP 04)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas sub variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAP 04) pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
(PSAP 04)	X2.1	0,866	9,164	1,701	Valid	0,774	> 0,60 : Reliabel
	X2.2	0,877	9,658	1,701	Valid		
	X2.3	0,774	6,468	1,701	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Kualitas *Website* menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,774 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAP 04) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

5. Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel kualitas penyajian laporan keuangan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r _{hitung}	t _{hitung}	t _{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Y1.1	0,922	12,600	1,701	Valid	0,969	> 0,60 : Reliabel
	Y1.2	0,787	6,750	1,701	Valid		
	Y1.3	0,712	5,366	1,701	Valid		
	Y1.4	0,846	8,396	1,701	Valid		
	Y1.5	0,846	8,396	1,701	Valid		
	Y1.6	0,922	12,600	1,701	Valid		
	Y1.7	0,771	6,406	1,701	Valid		
	Y1.8	0,825	7,725	1,701	Valid		
	Y1.9	0,917	12,165	1,701	Valid		
	Y1.10	0,909	11,540	1,701	Valid		
	Y1.11	0,895	10,617	1,701	Valid		
	Y1.12	0,712	5,366	1,701	Valid		
	Y1.13	0,771	6,406	1,701	Valid		
	Y1.14	0,846	8,396	1,701	Valid		
	Y1.15	0,922	12,600	1,701	Valid		
	Y1.16	0,670	4,776	1,701	Valid		

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk kualitas penyajian laporan keuangan menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,969 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel kualitas penyajian laporan keuangan adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan baik secara *simultan* maupun secara *parsial* pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Dari hasil olah

data dengan menggunakan program SPSS, maka secara ringkas hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat uji dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan besarnya
pengaruhvariabel X Terhadap Y

Pengaruh Antar Variabel	Besarnya Pengaruh	Nilai Sig	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
$Y \leftarrow X_1, X_2, X_3, X_4$	0,997	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_1$	0,367	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_2$	0,107	0,033	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_3$	0,278	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_4$	0,282	0,000	0,05	Signifikan	Diterima

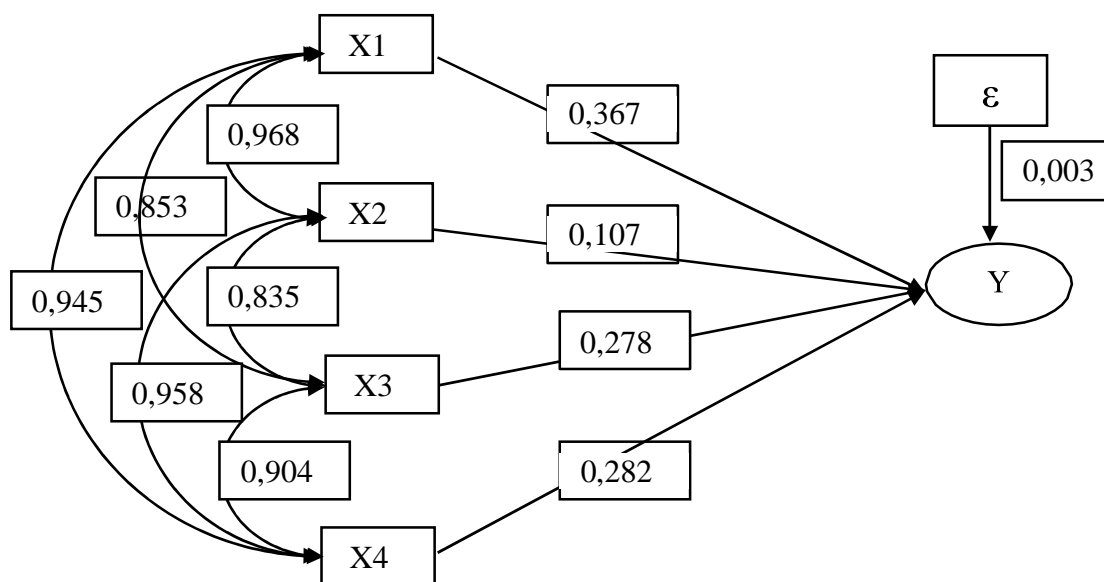
Keterangan : Jika nilai Sig < nilai Alpha (α), maka signifikan.

Sumber : Lampiran olah data

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa model di atas dapat dijelaskan oleh variasi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 0,997 (99,7%); sub variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 0,367 (36,7%); sub variabel Laporan Realisasi Anggaran (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 0,107 (10,7%). sub variabel Laporan Laporan Arus Kas (X3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 0,278 (27,8%). sub variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebesar 0,282 (28,2%). Dengan demikian dari hasil statistik, dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis yang diajukan pada tingkat pengujian signifikan 0,05 dapat diterima (terbukti).

Dari hasil estimasi pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), maka dapat digambarkan ke dalam model struktural jalur sebagai berikut:



Gambar 4.1 : Hasil Estimasi Struktur Analisis Jalur

Dari gambar di atas, maka dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model *simultan* sebagai berikut :

$$\text{Persamaan jalur : } Y = 0,367X_1 + 0,107X_2 + 0,278X_3 + 0,282X_4 + 0,003\varepsilon$$

Dengan $R^2 = 0,997$

Dari persamaan struktural jalur di atas, maka secara sistematis pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Dekomposisi Pengaruh Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan
terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)

Keterangan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total (%)
X ₁ Terhadap Y	0,367	-	36,7%
X ₂ Terhadap Y	0,107	-	10,7%
X ₃ Terhadap Y	0,278	-	27,8%
X ₄ Terhadap Y	0,282	-	28,2%
Pengaruh Variabel X ₁ ,X ₂ ,X ₃ ,X ₄ Terhadap Y			99,7%
Pengaruh Variabel luar Terhadap Y			0,3%
Total			100%

Sumber : Lampiran olah data, data di olah kembali

Dari persamaan struktural jalur di atas dapat dijelaskan hubungan antar setiap variabel. Sub variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan sebesar 0,367 artinya jika sub variabel Penyajian Laporan Keuangan ditingkatkan satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 36,7%. Sub variabel Laporan Realisasi Anggaran (X2) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,107 artinya jika Sub

variabel Laporan Realisasi Anggaran ditingkatkan satu satuan,, maka di ikuti dengan kenaikan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 10,7%. Sub variabel Laporan Arus Kas (X3) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,278 artinya jika Sub variabel Laporan Arus Kas (X3) ditingkatkan satu satuan,, maka di ikuti dengan kenaikan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 27,8%. Sub variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,282 artinya jika Sub variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) ditingkatkan satu satuan,, maka di ikuti dengan kenaikan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) sebesar 28,8%.

Nilai R square pada persamaan jalur di atas sebesar 0,997 atau 99,7% mengindikasi bahwa variasi nilai variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) ditentukan oleh variasi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan 0,3% ditentukan oleh variasi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dan Microsoft Excel 2013, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan secara *simultan* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Standar Akuntansi Pemerintahan secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, hasil ini dapat menjelaskan bahwa besarnya kontribusi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) dan terdapat variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan.

Besarnya pengaruh tersebut secara empiris dilapangan menunjukkan bahwa Dinas Sosial provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, harus memiliki karakteristik kualitatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain ; Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami

Akuntansi dengan basis akrual dipandang lebih baik daripada basis kas, karena diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik tujuannya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna untuk melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar, 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusup, 2014. Penerapan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada

Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

4.3.2 Standar Akuntansi Pemerintahan secara *parsial* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

1. Penyajian Laporan Keuangan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo..

Sub variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), besarnya pengaruh ini merupakan penentu dominan pengaruhnya terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran

kuesioner menunjukkan bahwa 6 orang atau 18,9% memberikan jawaban selalu mencatat beban dan pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan 16 orang atau 54,4% memberikan jawaban sering mencatat beban dan pendapatan pada saat terjadinya transaksi, ini sesuai dengan penjelasan PSAP01 bahwa entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan di atas, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selamasatu periode.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar, 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP (Penyajian Laporan Keuangan) berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Yusup, 2014. Penerapan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil Penelitian menunjukan bahwan Standar Akuntansi Pemerintahan (Penyajian Laporan Keuangan) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Penyajian Laporan Keuangan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

2. Laporan Realisasi Anggaran secara *parsial* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Sub Variabel Laporan Realisasi Anggaran (X_2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), besarnya pengaruh ini merupakan terkecil pengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner berada pada kategori Tinggi, hal ini disebabkan karena tujuan daripada Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar, 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Realisasi Anggaran) Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Realisasi Anggaran)) berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Yusup, 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian

Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil Penelitian menunjukan bahwan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Realisasi Anggaran) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawabkhususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Laporan Realisasi Anggaran secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

3. Laporan Arus Kas secara parsial berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Sub Variabel Laporan Arus Kas (X_3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), besarnya pengaruh ini bukan merupakan dominan pengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner

menunjukkan bahwa 6 orang atau 20,7% memberikan jawaban selalu menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi. dan 17 orang atau 57,3% memberikan jawaban sering menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi, ini sesuai dengan penjelasan PSAP03 bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- d. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

- e. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- f. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar, 2018. Pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP (Laporan Realisasi Anggaran) berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Yusup, 2014. Penerapan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil Penelitian menunjukan bahwan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Realisasi Anggaran) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Laporan Realisasi Anggaran secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan secara *parsial* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Sub Variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y), besarnya pengaruh ini bukan merupakan dominan pengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa 5 orang atau 17,8% memberikan jawaban selalu Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca dan Laba-rugi dan 9 orang atau 63,3% memberikan jawaban sering Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca dan Laba- rugi, ini sesuai dengan penjelasan PSAP04 bahwa Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan

Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi kepos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan

secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar, 2018. Pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP (Catatan atas Laporan Keuangan) berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Yusup, 2014. Penerapan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil Penelitian menunjukan bahwan Standar Akuntansi Pemerintahan (Catatan atas Laporan Keuangan) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung tergolong kedalam kategori baik, artinya Standar Akuntansi Pemerintahan pada Instansi Pemerintah Kota Bandung belum terbilang kedalam kategori yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab khususnya pada bidang keuangan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Catatan atas Laporan Keuangan secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis statistik pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan (X1), Laporan Realisasi Anggaran (X2), Laporan Arus Kas (X3) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (X4) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
2. Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo.
3. Laporan Realisasi Anggaran (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo.
4. Laporan Arus Kas (X3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

5. Catatan Atas Laporan (X4) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, kiranya menaruh perhatian terhadap sub variabel Laporan Realisasi Anggaran (X2) karean sesuai hasil penelitian terkecil pengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dengan cara sering melakukan pelatihan yang terkait dengan penerapan PP 71 tahun 2010.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti variabel luar yang turut berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri Krismiaji, 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Agoes Sukirno, 2004, Auditing, Jilid kesatu, Edisi ketiga, cetakan pertama, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anwar Nasution. 2007, Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
- Arthur W Holmes, David C Burw, 2006. Auditing Norma Dan Prosedur. Penerbit Erlangga Jakarta
- Hartadi, Bambang, 2007. Auditing Suatu Pedoman Pemeriksaan. Yogyakarta : BPFE
- Ifa Defri Stevani, 2014. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 T. Entang Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
- Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- I Gusti Agung Rai, 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriasari Nahartyo, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Nilai informasi Pelaporan keuangan daerah, Jurnal SNA XI Pontianak.
- Junita Putri, 2013. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik, Andi offset, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Melly Herawati, 2013. Penerapan SAP No.02 dalam penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3 Penerbit salemba Empat Jakarta.
- Nurlaela, Sitti dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosuka-wonosrate. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 13: 1-38.
- Nurlaila, 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pemerintah Kabupaten Enrekang).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008, tentang Pengendalian Intern Pemerintah
- Randal dan Alvin, 2012. Jasa Audit dan Assurance, Salemba Empat, Jakarta
- Santoso, Urip. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis, (Online), Vol. 4, No.1,([Http://journal.unpar.ac.id index.php/](http://journal.unpar.ac.id/index.php/)), diakses 23 Januari 2014).
- Sugiyono.2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan kedelapan Penerbit CV.Alfabeta Bandung.
- Tita Djuitaningsih, 2013. Pengaruh Penerapan PSAP Nomor 2. Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Pemerintahan Kota Tangerang
- Zaki Baridwan.2011.Sistem Akuntansi, Penerbit BPFE Yokyakrta

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR KOESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr.(i).....

Di.

Gorontalo.-

Hal : **Pemohonan Pengisian Kuesioner**

Saya yang bertanda tangan dibawah, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo”**

Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengisi/menjawab daftar pertanyaan yang terlampir. Untuk lebih meyakinkan Bapak/Ibu/Saudara (i) perlu kami informasikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu khususnya Akuntansi dan sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Ichsan Gorontalo. Semua data dan informasi yang diberikan akan dijamin **kerahasiaannya**.

Atas perkenan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Gorontalo,.....2021

Hormat Saya

Amrianto A. Labdul

INSTRUMEN PENELITIAN

Bagian I : Identitas Responden

Petunjuk : Beri tanda \surd pada kotak jawaban yang dianggap paling benar dan isi tempat yang telah dikosongkan.

A. Data Responden

1. No Responden :
2. Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. Instansi :
6. Jabatan di Instansi :
7. Masa Kerja : ☐ <5th ☐ 5-10th ☐ 10-15th ☐ >15th
8. Jumlah Bawahan :Orang
9. Alamat Instansi :

B. Pendidikan Terakhir : ☐ SMU ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

C. Pendidikan dan latihan yang pernah diikuti:

1.
2.
3.

D. Pengalaman kerja

1.
2.
3.

PETUNJUK ANGKET

Bagian II : Petunjuk Pegisian

- a. Kepada Bapak/Ibu/sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur dan sebenarnya.
- b. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
- c. Ada lima alternatif jawaban yaitu:
 - 5** = Selalu
 - 4** = Sering
 - 3** = Kadang-kadang
 - 2** = Jarang
 - 1** = Tidak Pernah

A. Sistem Pengendalian Intern Persediaan

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan (X₁)

1	Beban (Biaya)
	a. Selalu dicatat pada saat terjadinya transaksi
	b. Sering dicatat pada saat terjadinya transaksi
	c. Kadang-kadang dicatat pada saat terjadinya transaksi
	d. Jarang dicatat pada saat terjadinya transaksi
	e. Tidak pernah dicatat pada saat terjadinya transaksi

2	Laporan keuangan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran
	a. Selalu berdasarkan basis kas
	b. Sering berdasarkan basis kas
	c. Kadang-kadang berdasarkan basis kas
	d. Jarang berdasarkan basis kas
	e. Tidak pernah berdasarkan basis kas

3	Pendapatan
	a. Selalu dicatat pada saat terjadinya transaksi
	b. Sering dicatat pada saat terjadinya transaksi
	c. Kadang-kadang dicatat pada saat terjadinya transaksi
	d. Jarang dicatat pada saat terjadinya transaksi
	e. Tidak pernah dicatat pada saat terjadinya transaksi

PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas (X₂)

1	Laporan realisasi anggaran
	a. Selalu disajikan dalam satu periode pelaporan
	b. Sering disajikan dalam satu periode pelaporan
	c. Kadang-kadang disajikan dalam satu periode pelaporan
	d. Jarang disajikan dalam satu periode pelaporan
	e. Tidak pernah disajikan dalam satu periode pelaporan

2	Laporan realisasi anggaran
	a. Selalu diakui pada saat kas masuk
	b. Sering diakui pada saat kas masuk
	c. Kadang-kadang diakui pada saat kas masuk
	d. Jarang diakui pada saat kas masuk
	e. Tidak pernah diakui pada saat kas masuk

3	Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi belanja
	a. Selalu diakui pada saat kas keluar.
	b. Sering diakui pada saat kas keluar.
	c. Kadang-kadang diakui pada saat kas keluar.
	d. Jarang diakui pada saat kas keluar.
	e. Tidak pernah diakui pada saat kas keluar.

PSAP 03 Laporan Arus Kas (X₃)

1	Laporan arus kas menyajikan informasi
	a. Selalu mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.
	b. Sering mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.
	c. Kadang-kadang mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.
	d. Jarang mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.
	e. Tidak pernah mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi.

2	Pencatatan laporan arus kas
	a. Selalu diklasifikasikan operasi
	b. Sering diklasifikasikan operasi
	c. Kadang-kadang diklasifikasikan operasi
	d. Jarang diklasifikasikan operasi
	e. Tidak pernah diklasifikasikan operasi

3	Pencatatan laporan arus kas
	a. Selalu diklasifikasikan investasi
	b. Sering diklasifikasikan investasi
	c. Kadang-kadang diklasifikasikan investasi
	d. Jarang diklasifikasikan investasi
	e. Tidak pernah diklasifikasikan investasi

4	Pencatatan laporan arus kas
	a. Selalu diklasifikasikan pendanaan
	b. Sering diklasifikasikan pendanaan
	c. Kadang-kadang diklasifikasikan pendanaan
	d. Jarang diklasifikasikan pendanaan
	e. Tidak pernah diklasifikasikan pendanaan

5	Pencatatan laporan arus kas
	a. Selalu diklasifikasikan transitoris
	b. Sering diklasifikasikan transitoris
	c. Kadang-kadang diklasifikasikan transitoris
	d. Jarang diklasifikasikan transitoris
	e. Tidak pernah diklasifikasikan transitoris

PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (X₄)

1	Catatan atas laporan keuangan
	a. Selalu disusun secara sistematis.
	b. Sering disusun secara sistematis.
	c. Kadang-kadang disusun secara sistematis.
	d. Jarang disusun secara sistematis.
	e. Tidak pernah disusun secara sistematis.

2	Catatan atas laporan keuangan
	a. Selalu mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca
	b. Sering mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca
	c. Kadang-kadang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca
	d. Jarang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca
	e. Tidak pernah mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan neraca

3	Catatan atas laporan keuangan
	a. Selalu mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi
	b. Sering mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi
	c. Kadang-kadang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi
	d. Jarang mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi
	e. Tidak pernah mengungkapkan penjelasan pos-pos laporan laba-rugi

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)

Relevan (Y1.1)

1	Laporan keuangan yang disusun
	a. Selalu disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
	b. Sering disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
	c. Kadang-kadang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
	d. Jarang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
	e. Tidak pernah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2	Informasi dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat digunakan
	a. Selalu mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu
	b. Sering mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu
	c. Kadang-kadang mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu
	d. Jarang mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu
	e. Tidak pernah mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu

3	Informasi dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan
	a. Selalu memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).
	b. Sering memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).
	c. Kadang-kadang memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).
	d. Jarang memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).
	e. Tidak pernah memprediksi kejadian masa datang (<i>predictive value</i>).

4	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan
	a. Selalu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.
	b. Sering sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.
	c. Kadang-kadang sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.
	d. Jarang sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.
	e. Tidak pernah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.

5	Informasi dalam Laporan Keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi
	a. Selalu dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
	b. Sering dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
	c. Kadang-kadang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
	d. Jarang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.
	e. Tidak pernah dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

Andal (Y1.2)

6	Informasi yang dihasilkan
	a. Selalu menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya
	b. Sering menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya
	c. Kadang-kadang menggambarkan dgn jujur transaksi dan peristiwa lainnya
	d. Jarang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya
	e. Tidak pernah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya

7	Informasi yang dihasilkan
	a. Selalu bebas dari pengertian yang menyesatkan
	b. Sering bebas dari pengertian yang menyesatkan
	c. Kadang-kadang bebas dari pengertian yang menyesatkan
	d. Jarang bebas dari pengertian yang menyesatkan
	e. Tidak pernah bebas dari pengertian yang menyesatkan

8	Informasi yang disajikan
	a. Selalu dapat teruji kebenarannya
	b. Sering dapat teruji kebenarannya
	c. Kadang-kadang dapat teruji kebenarannya
	d. Jarang dapat teruji kebenarannya
	e. Tidak pernah dapat teruji kebenarannya

9	Informasi yang dihasilkan
	a. Selalu memenuhi kebutuhan para pengguna
	b. Sering memenuhi kebutuhan para pengguna
	c. Kadang-kadang memenuhi kebutuhan para pengguna
	d. Jarang memenuhi kebutuhan para pengguna
	e. Tidak pernah memenuhi kebutuhan para pengguna

10	Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan
	a. Selalu tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu
	b. Sering tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu
	c. Kadang-kadang tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu
	d. Jarang tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu
	e. Tidak pernah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu

Dapat dibandingkan (Y1.3)

11	Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan
	a. Selalu dapat dibandingkan
	b. Sering dapat dibandingkan
	c. Kadang-kadang dapat dibandingkan
	d. Jarang dapat dibandingkan
	e. Tidak pernah dapat dibandingkan

12	Dinas Sosial menggunakan kebijakan akuntansi
	a. Selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
	b. Sering berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
	c. Kadang-kadang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
	d. Jarang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
	e. Tidak pernah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

13	Dinas Sosial menggunakan kebijakan akuntansi
	a. Selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama
	b. Sering menggunakan kebijakan akuntansi yang sama
	c. Kadang-kadang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama
	d. Jarang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama
	e. Tidak pernah menggunakan kebijakan akuntansi yang sama

Dapat difahami (Y1.4)

14	Informasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan
	a. Selalu dapat difahami oleh pengguna.
	b. Sering dapat difahami oleh pengguna.
	c. Kadang-kadang dapat difahami oleh pengguna.
	d. Jarang dapat difahami oleh pengguna.
	e. Tidak pernah dapat difahami oleh pengguna.

15	Infomasi yang dihasilkan dari Laporan Keuangan
	a. Selalu disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
	b. Sering disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
	c. Kadang-kadang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
	d. Jarang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
	e. Tidak pernah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

16	Laporan Keuangan disusun secara sistematis
	a. Selalu disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti
	b. Sering disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti
	c. Kadang-kadang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti
	d. Jarang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti
	e. Tidak pernah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti

Lampiran 2. Data Ordinal**Sub Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)**

NO	Item Pernyataan			JUMLAH
	1	2	3	
1	4	3	3	10
2	5	4	4	13
3	4	4	4	12
4	4	3	3	10
5	4	3	3	10
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	4	3	3	10
10	4	4	4	12
11	4	3	3	10
12	5	3	3	11
13	4	3	3	10
14	5	5	5	15
15	4	2	2	8
16	5	5	5	15
17	4	4	4	12
18	5	5	5	15
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	3	3	3	9
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	3	3	4	10
29	3	3	3	9
30	4	4	4	12

Lampiran 2. Data Ordinal
Sub Variabel Laporan Realisasi Anggaran (X2)

NO	Item Pernyataan			JUMLAH
	1	2	3	
1	3	3	4	10
2	4	4	5	13
3	4	4	5	13
4	3	3	4	10
5	3	3	3	9
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	3	3	4	10
10	4	4	4	12
11	3	3	4	10
12	3	3	4	10
13	3	3	4	10
14	5	5	4	14
15	2	2	4	8
16	5	5	4	14
17	4	4	4	12
18	5	5	4	14
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	2	3	3	8
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	3	3	3	9
29	3	3	3	9
30	4	4	4	12

Lampiran 2. Data Ordinal
Sub Variabel Laporan Arus Kas (X3)

NO	Item Pernyataan					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	3	4	19
2	5	5	5	4	5	24
3	4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	3	4	19
5	4	3	4	3	4	18
6	4	4	4	4	4	20
7	3	4	4	4	3	18
8	3	4	4	4	3	18
9	3	4	4	3	3	17
10	5	4	4	4	5	22
11	2	4	4	3	2	15
12	5	4	5	3	5	22
13	4	4	4	3	4	19
14	5	4	5	5	5	24
15	4	4	4	2	4	18
16	5	4	5	5	5	24
17	4	4	4	4	4	20
18	5	4	5	5	5	24
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	3	23
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20

Lampiran 2. Data Ordinal**Sub Variabel Catatan Atas Laporan Keuangan (X)**

NO	Item Pernyataan			Jumlah
	1	2	3	
1	4	3	4	11
2	5	4	5	14
3	4	4	5	13
4	4	3	4	11
5	4	3	3	10
6	4	4	4	12
7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	4	3	4	11
10	4	4	4	12
11	4	3	4	11
12	5	3	4	12
13	4	3	4	11
14	5	5	4	14
15	4	2	4	10
16	5	5	4	14
17	4	4	4	12
18	5	5	4	14
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	3	3	3	9
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	3	3	4	10
29	3	3	3	9
30	4	4	4	12

Variabel Kualitas Informasi Penyajian Laporan Keuangan (Y)

[illegible]

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	15	50,0	50,0	66,7
	9	30,0	30,0	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	9	30,0	30,0	93,3

x2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	22	73,3	73,3	86,7
	4	13,3	13,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	8	26,7	26,7	26,7
	15	50,0	50,0	76,7
	6	20,0	20,0	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	22	73,3	73,3	86,7
	4	13,3	13,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

x3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	15	50,0	50,0	73,3
	7	23,3	23,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

x4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

x4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	23	76,7	76,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	6	20,0	20,0	20,0
	14	46,7	46,7	66,7
	9	30,0	30,0	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	22	73,3	73,3	86,7
	4	13,3	13,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	8	26,7	26,7	26,7
	15	50,0	50,0	76,7
	6	20,0	20,0	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	21	70,0	70,0	93,3
	2	6,7	6,7	100,0
	30	100,0	100,0	

y9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	9	30,0	30,0	93,3
	2	6,7	6,7	100,0
	30	100,0	100,0	

y10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	13	43,3	43,3	60,0
	11	36,7	36,7	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	6	20,0	20,0	20,0
	13	43,3	43,3	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	22	73,3	73,3	86,7
	4	13,3	13,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	8	26,7	26,7	26,7
	15	50,0	50,0	76,7
	6	20,0	20,0	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	7	23,3	23,3	23,3
	20	66,7	66,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

y15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	5	16,7	16,7	16,7
	14	46,7	46,7	63,3
	10	33,3	33,3	96,7
	1	3,3	3,3	100,0
	30	100,0	100,0	

y16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	13,3	13,3	13,3
	23	76,7	76,7	90,0
	3	10,0	10,0	100,0
	30	100,0	100,0	

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1
x1.1	Pearson Correlation	1	,619**	,539**	,763**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,000
	N	30	30	30	30
x1.2	Pearson Correlation	,619**	1	,972**	,975**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30
x1.3	Pearson Correlation	,539**	,972**	1	,951**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000
	N	30	30	30	30
x1	Pearson Correlation	,763**	,975**	,951**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,884	,880	3

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2
x2.1	Pearson Correlation	1	,976**	,555**	,974**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000
	N	30	30	30	30
x2.2	Pearson Correlation	,976**	1	,509**	,960**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,000
	N	30	30	30	30
x2.3	Pearson Correlation	,555**	,509**	1	,716**
	Sig. (2-tailed)	,001	,004		,000
	N	30	30	30	30
x2	Pearson Correlation	,974**	,960**	,716**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	

N	30	30	30	30
---	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,869	,865	3

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3
x3.1	Pearson Correlation	1	,500**	,766**	,566**	,892**	,924**
	Sig. (2-tailed)		,005	,000	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
x3.2	Pearson Correlation	,500**	1	,689**	,509**	,335	,693**
	Sig. (2-tailed)	,005		,000	,004	,071	,000
	N	30	30	30	30	30	30
x3.3	Pearson Correlation	,766**	,689**	1	,619**	,636**	,885**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
x3.4	Pearson Correlation	,566**	,509**	,619**	1	,428*	,766**
	Sig. (2-tailed)	,001	,004	,000		,018	,000
	N	30	30	30	30	30	30
x3.5	Pearson Correlation	,892**	,335	,636**	,428*	1	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000	,071	,000	,018		,000
	N	30	30	30	30	30	30
x3	Pearson Correlation	,924**	,693**	,885**	,766**	,830**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,873	,880	5

Correlations

		x4.1	x4.2	x4.3	x4
x4.1	Pearson Correlation	1	,619**	,599**	,866**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30
x4.2	Pearson Correlation	,619**	1	,476**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,000		,008	,000
	N	30	30	30	30
x4.3	Pearson Correlation	,599**	,476**	1	,774**
	Sig. (2-tailed)	,000	,008		,000
	N	30	30	30	30
x4	Pearson Correlation	,866**	,877**	,774**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,774	,796	3

		Correlations				
		x1	x2	x3	x4	y
x1	Pearson Correlation	1	,968**	,852**	,945**	,974**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
x2	Pearson Correlation	,968**	1	,835**	,958**	,965**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
x3	Pearson Correlation	,852**	,835**	1	,904**	,935**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30
x4	Pearson Correlation	,945**	,958**	,904**	1	,983**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30
y	Pearson Correlation	,974**	,965**	,935**	,983**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9
y1	Pearson Correlation	1	,891"	,509"	,619"	,619"	1,000"	,566"	,602"	,976"
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y2	Pearson Correlation	,891"	1	,332	,432"	,432"	,891"	,442"	,561"	,772"
	Sig. (2-tailed)	,000		,073	,017	,017	,000	,014	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y3	Pearson Correlation	,509"	,332	1	,689"	,689"	,509"	,500"	,619"	,555"
	Sig. (2-tailed)	,004	,073		,000	,000	,004	,005	,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y4	Pearson Correlation	,619"	,432"	,689"	1	1,000"	,619"	,766"	,948"	,661"
	Sig. (2-tailed)	,000	,017	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y5	Pearson Correlation	,619"	,432"	,689"	1,000"	1	,619"	,766"	,948"	,661"
	Sig. (2-tailed)	,000	,017	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y6	Pearson Correlation	1,000"	,891"	,509"	,619"	,619"	1	,566"	,602"	,976"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,000		,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y7	Pearson Correlation	,566"	,442"	,500"	,766"	,766"	,566"	1	,742"	,582"
	Sig. (2-tailed)	,001	,014	,005	,000	,000	,001		,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y8	Pearson Correlation	,602"	,561"	,619"	,948"	,948"	,602"	,742"	1	,576"
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000		,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y9	Pearson Correlation	,976"	,772"	,555"	,661"	,661"	,976"	,582"	,576"	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,001	,001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y10	Pearson Correlation	,973"	,870"	,502"	,620"	,620"	,973"	,558"	,607"	,948"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y11	Pearson Correlation	,974"	,866"	,489"	,585"	,585"	,974"	,544"	,565"	,952"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,006	,001	,001	,000	,002	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y12	Pearson Correlation	,509"	,332	1,000"	,689"	,689"	,509"	,500"	,619"	,555"
	Sig. (2-tailed)	,004	,073		,000	,000	,004	,005	,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y13	Pearson Correlation	,566"	,442"	,500"	,766"	,766"	,566"	1,000"	,742"	,582"
	Sig. (2-tailed)	,001	,014	,005	,000	,000	,001	,000	,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y14	Pearson Correlation	,619"	,432"	,689"	1,000"	1,000"	,619"	,766"	,948"	,661"
	Sig. (2-tailed)	,000	,017	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
y15	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	1,000"	,891"	,509"	,619"	,619"	1,000"	,566"	,602"	,976"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,000	,000	,001	,000	,000
y16	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,476"	,459"	,938"	,599"	,599"	,476"	,446"	,641"	,448"
	Sig. (2-tailed)	,008	,011	,000	,000	,000	,008	,013	,000	,013
v	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,922"	,787"	,712"	,846"	,846"	,922"	,771"	,825"	,917"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

		y10	y11	y12	y13	y14	y15	y16	y
y1	Pearson Correlation	,973"	,974"	,509"	,566"	,619"	1,000"	,476"	,922"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,001	,000	,000	,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y2	Pearson Correlation	,870"	,866"	,332	,442"	,432"	,891"	,459"	,787"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,073	,014	,017	,000	,011	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y3	Pearson Correlation	,502"	,489"	1,000"	,500"	,689"	,509"	,938"	,712"
	Sig. (2-tailed)	,005	,006	,000	,005	,000	,004	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y4	Pearson Correlation	,620"	,585"	,689"	,766"	1,000"	,619"	,599"	,846"
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y5	Pearson Correlation	,620"	,585"	,689"	,766"	1,000"	,619"	,599"	,846"
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y6	Pearson Correlation	,973"	,974"	,509"	,566"	,619"	1,000"	,476"	,922"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,001	,000	,000	,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y7	Pearson Correlation	,558"	,544"	,500"	1,000"	,766"	,566"	,446"	,771"
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,005	,000	,000	,001	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y8	Pearson Correlation	,607"	,565"	,619"	,742"	,948"	,602"	,641"	,825"
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y9	Pearson Correlation	,948"	,952"	,555"	,582"	,661"	,976"	,448"	,917"
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,001	,000	,000	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y10	Pearson Correlation	1	,949"	,502"	,558"	,620"	,973"	,472"	,909"
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,001	,000	,000	,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

y11	Pearson Correlation	,949 ^{**}	1	,489 ^{**}	,544 ^{**}	,585 ^{**}	,974 ^{**}	,454 [*]	,895 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,006	,002	,001	,000	,012	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y12	Pearson Correlation	,502 ^{**}	,489 ^{**}	1	,500 ^{**}	,689 ^{**}	,509 ^{**}	,938 ^{**}	,712 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,005	,006		,005	,000	,004	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y13	Pearson Correlation	,558 ^{**}	,544 ^{**}	,500 ^{**}	1	,766 ^{**}	,566 ^{**}	,446 [*]	,771 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,005		,000	,001	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y14	Pearson Correlation	,620 ^{**}	,585 ^{**}	,689 ^{**}	,766 ^{**}	1	,619 ^{**}	,599 ^{**}	,846 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y15	Pearson Correlation	,973 ^{**}	,974 ^{**}	,509 ^{**}	,566 ^{**}	,619 ^{**}	1	,476 ^{**}	,922 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,001	,000		,008	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y16	Pearson Correlation	,472 ^{**}	,454 [*]	,938 ^{**}	,446 [*]	,599 ^{**}	,476 ^{**}	1	,670 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,008	,012	,000	,013	,000	,008		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
y	Pearson Correlation	,909 ^{**}	,895 ^{**}	,712 ^{**}	,771 ^{**}	,846 ^{**}	,922 ^{**}	,670 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,969	,970	16

Hasil Uji Hipotesisi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,999 ^a	,998	,997	,46950	,998	2738,406	4	25	,000

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2414,489	4	603,622	2738,406	,000 ^b
Residual	5,511	25	,220		
Total	2420,000	29			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,850	,803		-1,058	,300
x1	1,751	,192	,367	9,110	,000
x2	,510	,225	,107	2,260	,033
x3	,893	,076	,278	11,732	,000
x4	1,657	,260	,282	6,371	,000

a. Dependent Variable: y

Perhitungan t-hitung

Rumus :

$$t\text{-hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Item	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Ket
X1.1	0,763	0,582	30	4,037	0,646	6,246	2,048	valid
X1.2	0,975	0,951	30	5,159	0,222	23,218	2,048	valid
X1.3	0,951	0,904	30	5,032	0,309	16,275	2,048	valid

Item	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Ket
X2.1	0,974	0,949	30	5,154	0,227	22,750	2,048	valid
X2.2	0,960	0,922	30	5,080	0,280	18,142	2,048	valid
X2.3	0,716	0,513	30	3,789	0,698	5,427	2,048	valid

Item	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Ket
X3.1	0,924	0,854	30	4,889	0,382	12,786	2,048	valid
X3.2	0,693	0,480	30	3,667	0,721	5,086	2,048	valid
X3.3	0,885	0,783	30	4,683	0,466	10,058	2,048	valid
X3.4	0,766	0,587	30	4,053	0,643	6,305	2,048	valid
X3.5	0,830	0,689	30	4,392	0,558	7,874	2,048	valid

Item	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Ket
X4.1	0,866	0,750	30	4,582	0,500	9,164	2,048	valid
X4.2	0,877	0,769	30	4,641	0,480	9,658	2,048	valid
X4.3	0,774	0,599	30	4,096	0,633	6,468	2,048	valid

Item	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Ket
Y.1	0,922	0,850	30	4,879	0,387	12,600	2,048	valid
Y.2	0,787	0,619	30	4,164	0,617	6,750	2,048	valid
Y.3	0,712	0,507	30	3,768	0,702	5,366	2,048	valid
Y.4	0,846	0,716	30	4,477	0,533	8,396	2,048	valid
Y.5	0,846	0,716	30	4,477	0,533	8,396	2,048	valid
Y.6	0,922	0,850	30	4,879	0,387	12,600	2,048	valid
Y.7	0,771	0,594	30	4,080	0,637	6,406	2,048	valid
Y.8	0,825	0,681	30	4,365	0,565	7,725	2,048	valid
Y.9	0,917	0,841	30	4,852	0,399	12,165	2,048	valid
Y.10	0,909	0,826	30	4,810	0,417	11,540	2,048	valid
Y.11	0,895	0,801	30	4,736	0,446	10,617	2,048	valid
Y.12	0,712	0,507	30	3,768	0,702	5,366	2,048	valid
Y.13	0,771	0,594	30	4,080	0,637	6,406	2,048	valid
Y.14	0,846	0,716	30	4,477	0,533	8,396	2,048	valid
Y.15	0,922	0,850	30	4,879	0,387	12,600	2,048	valid
Y.16	0,670	0,449	30	3,545	0,742	4,776	2,048	valid

Nilai-nilai dalam Distribusi t

d.f.	TINGKAT SIGNIFIKANSI						
dua sisi	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
satu sisi	10%	5%	2,5%	1%	0,5%	0,1%	0,05%
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532



E1116083-AMRIANTO A. LABDUL-PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUAN...

Mar 29, 2021

14782 words / 93467 characters

E1116083

AMRIANTO A. LABDUL.docx

Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

1	catatanpamong.blogspot.com	INTERNET	3%
2	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	UNPUBLISHED WORKS	2%
3	elib.unikom.ac.id	INTERNET	2%
4	journal.feb.unmul.ac.id	INTERNET	2%
5	www.scribd.com	INTERNET	1%
6	repository.upi.edu	INTERNET	1%
7	ojs.umsida.ac.id	INTERNET	1%
8	repository.unhas.ac.id	INTERNET	1%
9	ejournal.unisnu.ac.id	INTERNET	1%
10	www.wikiapbn.org	INTERNET	1%
11	jurnal.unpand.ac.id	INTERNET	<1%
12	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
13	jdih.malangkab.go.id	INTERNET	<1%
14	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
15	www.universitaspikologi.com	INTERNET	<1%
16	vdocuments.site	INTERNET	<1%

17	es.scribd.com	INTERNET	<1%
18	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
19	ejurnal.pps.ung.ac.id	INTERNET	<1%
20	a-research.upi.edu	INTERNET	<1%
21	repository.unej.ac.id	INTERNET	<1%
22	jdi.h.bekasikota.go.id	INTERNET	<1%
23	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
24	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
25	anzdoc.com	INTERNET	<1%
26	balitbang.pemkomedan.go.id	INTERNET	<1%
27	haris-tambera.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
29	blog.binadarma.ac.id	INTERNET	<1%
30	digilib.sunan-ampel.ac.id	INTERNET	<1%
31	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
32	ejournal.undiksha.ac.id	INTERNET	<1%
33	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
34	docobook.com	INTERNET	<1%
35	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-18	SUBMITTED WORKS	<1%
36	eprints.polsri.ac.id	INTERNET	<1%
37	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
38	library.um.ac.id	INTERNET	<1%
39	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
40	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%

41	www.stiesternbi.ac.id	INTERNET	<1%
42	Hadi Jauhari, Evada Dewata Dewata, Suhairi Haziema. "PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNT..."	CRICORPHE	<1%
43	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-28	SUBMITTED WORKS	<1%
44	docplayer.info	INTERNET	<1%
45	bambangkesit.files.wordpress.com	INTERNET	<1%
46	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16	SUBMITTED WORKS	<1%
47	adoc.tips	INTERNET	<1%
48	ksap.org	INTERNET	<1%
49	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id	INTERNET	<1%
50	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
51	media.neliti.com	INTERNET	<1%
52	diploma4stan.wordpress.com	INTERNET	<1%
53	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
54	johannessimatupang.wordpress.com	INTERNET	<1%
55	www.infoduniaedukasi.com	INTERNET	<1%
56	www.netadviser.ro	INTERNET	<1%
57	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, Emi Suryati. "FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH", JURN...	CRICORPHE	<1%
58	Saifudin Saifudin, Sulistyawati Ika Ardiani. "CONFLICT MANAGEMENT MODEL OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM: APPLICATED I...	CRICORPHE	<1%
59	digilib.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
60	diklatbpom.files.wordpress.com	INTERNET	<1%
61	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
62	keuanganegara.id	INTERNET	<1%
63	smal.fti.mercubuana-yogya.ac.id	INTERNET	<1%
64	dokumen.tips	INTERNET	<1%

65	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
66	eprints.unm.ac.id	INTERNET	<1%
67	Journal.stiem.ac.id	INTERNET	<1%
68	www.maxmanroe.com	INTERNET	<1%
69	digilib.ulnsby.ac.id	INTERNET	<1%
70	repository.usm.ac.id	INTERNET	<1%
71	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
72	journal.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
73	repository.ugm.ac.id	INTERNET	<1%
74	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
75	www.masnasih.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0067/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : AMRIANTO A. LABDUL
NIM : E1116083
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Maret 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2209/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Amrianto A. Labdul
NIM : E1116083
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 24 Maret 2020

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



GUBERNUR GORONTALO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol/342 /IH/2021

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- e. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Teknis Daerah
- f. Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 2209/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tanggal 01 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian.
- g. Surat Rekomendasi Penelitian sebelumnya dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Nomor: 070/Kesbangpol/1453/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

2. Menimbang:

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian serta Stabilitas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maka perlu memberikan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Izin Penelitian.

GUBERNUR GORONTALO, memberikan rekomendasi kepada:

- a. nama : Amrianto A. Labdul
- b. nim : E1116083
- c. program studi : S1- Akuntansi
- d. alamat peneliti : Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo
- e. untuk : Melaksanakan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo)"**

Dengan uraian:

- 1) Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Yang diterapkan di kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
- 2) Lokasi Penelitian : Dinas Sosial PP & PA Provinsi Gorontalo
- 3) Waktu Penelitian : Maret s.d Mei 2021

3. Sebelum melakukan Penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitanya dengan judul penelitian dimaksud.
5. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
6. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.
7. Hasil Penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada **Gubernur Gorontalo Cq. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo**.
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

01 Maret 2021

a.n. GUBERNUR GORONTALO
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO



Muh. Ali Imran Bali, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660406 198603 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
3. Yang Bersangkutan

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama	: Amrianto A. Labdul
Nim	: E1116083
Tempat/Tgl Lahir	: Batudaa, 02-11-1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Angkatan	: 2016
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SD. N. 47 Manado, Lulusan Tahun 2009.
- SMP. N. 5 Manado, Lulusan Tahun 2012.
- MAN. MODEL Manado, Lulusan Tahun 2015.
- Dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN) Jurusan Akuntansi pada Tahun 2016.

2. Pendidikan Non Formal

- Peserta Kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Ichsan Gorontalo.
- Peserta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2016.
- Peserta KKLP Technopreneur Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2019 di Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.